

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang topik dalam pembahasan penelitian, peneliti mencoba menelusuri berbagai karya tulis (*literature*) dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang berkaitan dengan topik pokok bahasan utama dalam penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian, dan mengembangkan konsep pemikiran dalam penelitian sebagai pendukung teori. Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian-penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan sejumlah penelitian yang lalu berkenaan pada penelitian ini. Sejumlah penelitian yang lalu tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Dinamika Hubungan Korea Selatan-Korea Utara dalam Mewujudkan Reunifikasi di Semenanjung Korea Periode 2003-2008, oleh Lilis Widyasari (2012)

Berdasarkan penelitian ini, dijelaskan bahwa hubungan yang muncul di Semenanjung Korea antara tahun 2003 dan 2008 mengarungi dinamika yang kompleks. Periode 2003, beragam usaha telah dilaksanakan demi menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme pertemuan enam pihak (*Six Party Talk*) membicarakan isu nuklir Korea Utara yang

melibatkan Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Jepang, serta tentu saja dihadiri oleh kedua Negara yang berkonflik. Untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Semenanjung Korea, KTT antar-Korea harus membuat usulan atau proposal yang konkrit. Diantaranya adalah menyangkut solusi untuk masa depan reunifikasi Korea.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan penyatuan Semenanjung Korea yaitu dari perlakuan Korea Utara yang menerapkan jamak ganda untuk rancangan nuklirnya. Selain itu, Korea Utara menunjukkan perilaku baik terhadap tiap kesepakatan yang disetujui. Korea Utara juga bergabung dengan program nuklirnya dan memperluasnya. Oleh karena itu, menciptakan masyarakat Korea yang bersatu dan hidup berdampingan dengan damai bukan suatu misi yang sederhana serta memerlukan waktu lebih.

Hambatan tersebut bersumber dari perbedaan mendasar yaitu ideologi kedua Korea yang menimbulkan kesan bahwa penyatuan Korea tidak akan mudah karena masing-masing Korea menganggap ideologinya lebih unggul. Selain itu, Korea Utara menghadapi ancaman kemanusiaan seperti kelaparan, kerusakan sipil, potensi migrasi massal, dan bahaya kemiliteran global. Tantangan terbesar demi memenuhi hambatan di sini adalah kurangnya konsensus di antara negara-negara tetangga tentang dampak setiap langkah secara langsung atau tidak langsung terhadap Pyongyang.

B. Analisis Peran ASEAN dalam Proses Unifikasi Semenanjung Korea, oleh Alfredo Yowel Antaribaba, Agus Salim, J Jumino (2021)

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai akibat dari Perang Korea yang sampai saat ini memisahkan kedua Korea. Ketegangan di Semenanjung Korea bertambah karena Korea Utara terus mengembangkan senjata pembunuh massalnya di kawasan. Ada sejumlah tindakan yang dinilai berbahaya terhadap kestabilan di Semenanjung Korea, diantaranya yaitu pengembangan dan tes peluncuran misil oleh Korea Utara. Kerja sama militer serta latihan bersama antar AS dan Korea Selatan menyebabkan ketegangan tinggi di semenanjung. Korea Selatan juga telah menciptakan sistem pertahanan bernama *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* demi menyeimbangkan keunggulan senjata milik Korea Utara.

Penulis menggunakan penelitiannya untuk menjelaskan teori keamanan regional. Berdasarkan pemaparan teori kompleks keamanan regional, nampaknya suatu negara dan sekelompok negara dapat menggunakan konteks keamanan regional demi mengatasi permasalahan di wilayah. Konsep ini memperlihatkan bahwasannya kerumitan situasi aman di semenanjung Korea tercermin pada peningkatan persenjataan nuklir oleh Korea Utara yang mempersulit *progress* integrasi kawasan serta meredakan ketegangan. ASEAN merupakan organisasi dalam kawasan yang telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan bahkan setelah berpuluh-puluh tahun, menunjukkan kalau ASEAN dipandang menjadi salah satu aktor mempengaruhi de-eskalasi di Semenanjung Korea.

Peneliti meneliti bahwasannya pola seperti ini mendukung kemajuan reunifikasi kedua Korea untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, dengan menggunakan dukungan organisasi regional seperti ASEAN sebagai referensi. Gagasan kepentingan nasional merupakan konsep yang menganalisis strategi negara sebagai aktor utama dengan posisi negosiasi kolaboratif untuk menegaskan kepentingan nasionalnya. Proses reunifikasi kedua Korea bukan saja memperhatikan urgensi aktor bersangkutan, tetapi juga kepentingan aktor lain, khususnya ASEAN, yang terlibat dalam pelaksanaannya.

C. *Indonesia's Role In Peace Efforts In Semenanjung Korea*, oleh Hasto Kristiyanto, Purnomo Yusgiantoro, Amrulla Octavian, dan I Wayan Midhio (2021)

Pembahasan yang tercantum menjelaskan peran Indonesia dalam usaha memulihkan situasi damai di Semenanjung Korea dengan mempertimbangkan potensi Korea Utara yang berada pada garis depan kekuatan militer dengan sistem yang sepenuhnya totaliter. Pada waktu yang sama, Korea Selatan bertindak secara demokratis dalam membangun kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengalaman traumatik yang ditimbulkan akibat pendudukan Jepang. Penyatuan kepentingan kompetitif kedua negara menjadi titik tolak rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan antar kedua Korea. Namun, inisiasi lain dapat dilakukan melalui diplomasi sosial dan budaya, membangun rasa saling percaya, dan secara bertahap

merumuskan diplomasi, serta mengelaborasi kode etik perdamaian Semenanjung Korea sendiri oleh rakyat Korea tanpa campur tangan pihak luar.

Perang Korea yang berlangsung pada tahun 1950-1953 tanpa menandatangani perjanjian damai, harus dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi dengan deklarasi perdamaian. Di sinilah Indonesia dapat memainkan perannya. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa peran penting Indonesia adalah mendorong perdamaian tanpa perang atau *hard power* dan sebaliknya mendorong perdamaian antar Negara yang bertikai di Semenanjung Korea dengan mengutamakan diplomasi atau *soft power*. Dengan meletakkan filosofi pentingnya peran Indonesia dalam perdamaian dunia, termasuk inisiatif dalam konflik Korea, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bahwa konflik dapat diselesaikan melalui dialog, refleksi dan jalan Pancasila. Meski perdamaian akan berlangsung lama dan memakan proses yang cukup panjang, Indonesia yakin akan mampu mendorong stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan bersama.

2.2 Kajian Kepustakaan

2.2.1 Konsep Manajemen Konflik (*Conflict Management Concept*)

Studi ilmu Hubungan Internasional tidak lepas dari diskusi mengenai gejala yang ada dalam lingkup internasional. Paradigma realis melihat konflik sebagai keadaan alamiah, sedangkan liberalisme melihat konflik sebagai hal yang wajar dalam

hubungan internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa interaksi antara negara atau negara dan aktor non-negara di tingkat internasional sangat bertentangan. Korelasi antar aktor internasional didasarkan pada kepentingan masing-masing aktor. Berdasarkan hubungan kerja sama universal dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan, konflik kepentingan aktor negara melahirkan kemungkinan masalah konflik di antara para kubu.

Secara etimologis, konflik lahir dari bahasa latin “*configure*” dengan arti “memukul”. Dalam makna yang lebih luas, konflik merupakan tindakan yang menghalangi, menghambat, atau mengganggu orang lain oleh salah satu pihak ke dalam kelompok/organisasi masyarakat lain. Jika konteksnya menyangkut kenegaraan atau konflik internasional, maka konteksnya adalah sekumpulan negara.¹ Konflik memiliki definisi mengenai nilai dan tuntutan yang diperebutkan untuk mendapatkan status, kekuasaan, sumber daya yang tidak cukup untuk masyarakat umum, yang mana pihak yang bersengketa tidak hanya ingin memiliki barang yang mereka inginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau bahkan menyulitkan lawan yang dihadapi.

Disiplin Hubungan Internasional menerangkan bahwa konflik diartikan secara lebih jelas dan serius. Ini terjadi di komunitas internasional karena pemahaman pandangan *an anarchic Hobbesian jungle* yang berarti semua manusia bertempur diakibatkan tidak ada Leviathan atau disebut juga sebagai monster laut kolosal yang mampu memusnahkan dunia. Teori HI menegaskan bahwasannya

¹ Yusuf Abdhul, “Pengertian dan Faktor Penyebab Konflik Internasional”, Deepublish Store, 3 Oktober 2022, <https://deepublishstore.com/materi/penyebab-konflik-internasional/> (diakses pada 1 Januari 2023).

konflik merupakan "*the state of nature of international life*" yang berarti konflik merupakan keadaan yang alamiah terjadi dalam dunia internasional.²

Terdapat 2 istilah yang kerap diaplikasikan dengan beriringan serta bergiliran dalam situasi konflik yang disebut manajemen konflik serta resolusi konflik. Dalam hal ini, konsep manajemen konflik digunakan untuk menjelaskan upaya pemulihan perdamaian dan stabilitas semenanjung Korea. Manajemen konflik merupakan metode mengenali serta mengatasi konflik dengan cara cerdas, adil, dan juga efektif menggunakan 3 desain manajemen konflik, yaitu percobaan konflik, mitigasi konflik, serta resolusi konflik.

Ketika timbul masalah, para pihak bisa menentukan perdamaian antar penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, maupun percampuran keduanya. Pada kedudukan ini, manajemen konflik bertujuan untuk membujuk para kubu yang berkonflik bekerja sama bahkan pada suasana krisis yang sedang berjalan. Sumita (2020) menyatakan bahwa konsep manajemen konflik adalah prosedur yang bukan saja membicarakan manajemen konflik, namun menunjukkan manajemen konflik melalui tekanan atau persaingan serta tanpa tekanan atau kerjasama.³

Manajemen konflik merupakan metode yang dijalankan oleh manajer untuk memproses, mengurangi, dan mengatasi konflik untuk arah menaikkan efektivitas personal serta produktivitas organisasi. Konsep ini melibatkan bantuan internal, kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ataupun kesepakatan dari pihak

² Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian", *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, Vol.2 No.1 (Mei 2022), hal. 18.

³ Benita Sumita, "Conflict Management", Oxford Bibliographies, 8 Juli 2020, <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0004.xml> (diakses pada 4 Januari 2023).

ketiga. Pendekatan mengarah pada cara yang mengacu pada cara klien berkomunikasi serta dengan cara apa orang-orang tersebut memengaruhi keutuhan serta interpretasi konflik.⁴

Cakupan kajian tentang manajemen konflik merangkul aspek yang luas karena berkaitan dengan studi dalam ilmu-ilmu sosial lainnya. Tegasnya, fokus perhatian dalam manajemen konflik selalu pada masalah sosial, terutama masalah ekonomi, budaya, antropologis, politik, psikologis, dan sosiologis. Hubungan antara manajemen konflik dan ilmu-ilmu sosial lainnya dengan demikian tidak hanya dalam konteks rasionalitas dan empirisme, tetapi juga dalam isi, relevansi, substansi, serta implikasi dari isu-isu konflik yang muncul pada tingkat personal, interpersonal, dan kelembagaan.

Dalam praktiknya, metode manajemen konflik yang digunakan oleh pihak ketiga dapat dibagi menjadi empat bidang utama sesuai dengan kebutuhannya di lapangan, antara lain yaitu:⁵

- a) *Threatbased*, yaitu penggunaan kekuatan persenjataan untuk memaksa pihak-pihak bertikai menghentikan peperangan.
- b) *Deterrencebased*, yaitu penggunaan kekuatan persenjataan, dan beberapa instrumen diplomasi yang sifatnya menekan pihak.
- c) *Accomodationist*, yaitu penggunaan cara persuasi diplomatik dengan menawarkan kesepakatan bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- d) *Ajudicatory*, yaitu penggunaan sarana hukum melalui sistem kelembagaan

⁴“Eko Sudarmanto, dkk., *Manajemen Konflik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 16”

⁵“Penny Kurnia Putri, *Op.Cit.*, 22.”

formal untuk menegakkan kesepakatan.

Masalah keamanan di Semenanjung Korea baru-baru ini kembali mengemuka dalam perbincangan dunia internasional. Posisi kesejahteraan di Semenanjung Korea selama ini tidak dapat dinilai aman dikarenakan belum tercapainya kesepakatan damai antara kedua Korea dengan isu pengembangan nuklir Korea Utara yang belum terselesaikan, sehingga sering timbul ketegangan di kawasan ini. Situasi keamanan yang masih belum kondusif di Semenanjung Korea dan potensi konflik menjadi perhatian rakyat global meninjau konsekuensinya bagi kestabilan wilayah, sampai seluruh dunia, apabila masalah kedamaian wilayah tidak dapat diselesaikan.

Indonesia adalah salah satu negara tetangga Semenanjung Korea. Meskipun tidak ada perbatasan langsung, tidak ada perbatasan darat atau laut, namun setiap tindakan negara di Semenanjung Korea dapat mempengaruhi kesatuan serta situasi aman di Indonesia, terutama percobaan peluncuran nuklir Korea Utara yang sedang berlangsung. Identitas bangsa Indonesia sebagai fasilitator dan pengesahan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)* atau Konvensi Anti Tes Senjata Nuklir bermaksud mendukung tercapainya bumi yang aman dari berbagai macam jenis uji coba seta peledakan nuklir.⁶

Indonesia secara nyata mempunyai aliansi diplomasi yang positif antar kedua Negara ini, bantuan tangan dan keterlibatannya sangatlah dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini. Melalui konsep manajemen konflik, Indonesia memiliki

⁶ Chayu Amrita Nanda, dkk., "Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Krisis Semenanjung Korea Guna Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 9 No. 1 (April 2019), hal. 73.

peluang untuk berperan sebagai pihak ketiga dalam memulihkan perdamaian di Semenanjung Korea. Manajemen konflik merupakan upaya yang mampu dipakai oleh kubu yang berkonflik atau pihak ketiga dalam menyelesaikan bentrokan antar kedua Korea untuk menemukan titik terang bagi masalah yang terjadi di kawasan. Proses penggunaan manajemen konflik dapat dilihat pada pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak ketiga yang mengembangkan skema konflik serta menggunakannya demi menyelesaikan pertentangan guna mencapai solusi yang diharapkan.

Manajemen konflik merupakan prosedur yang ditujukan untuk mengelola krisis berkelanjutan antar negara maupun aktor sekunder, biasanya dengan menarik pihak ketiga. Karena konflik meningkat karena ketidakmampuan pemerintah daerah untuk mengamankan situasi, pihak ketiga, dalam hal ini Indonesia, dapat terlibat dalam kewenangan tersebut.

2.2.2 Teori Kekuatan Nasional (*National Power Theory*)

Politik internasional yaitu kajian penting pada HI karena mengkaji segala macam kepentingan dan perebutan kekuasaan. Politik internasional adalah suatu bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yang berurusan dalam arti yang lebih sempit dengan isu-isu politik masyarakat internasional, yaitu diplomasi dan hubungan antara negara dan entitas politik lainnya. Fokus penelitian politik internasional dan kebijakan luar negeri adalah menjelaskan kepentingan, tindakan, dan elemen kekuasaan.⁷ Aktor dalam politik

⁷ Debbie Affianty, *Diktat Mata Kuliah: Politik Internasional*, <http://repository.umj.ac.id/8536/1/DIKTAT-Politik%20Internasional.pdf> (diakses pada 1 Januari 2023)

internasional hanyalah negara, hal inilah yang membuat politik internasional berbeda dengan hubungan internasional.

Tujuan setiap aktor (negara) merupakan kekuasaan atau kekuasaan. Arnold Schwarzenberger melihat bahwa kekuasaan merupakan faktor terpenting dalam HI. Menurutnya, bangsa yang ada di skema internasional lebih banyak menjalankan yang ingin mereka kendalikan dengan cara fisik dan bukan yang selayaknya dilakukan dengan cara moral.⁸ Negara adalah lembaga tertinggi dan memiliki hak berdaulat untuk menentukan nasib sendiri. Sebab itu, negara tidak bisa dilepas dari segala peluang untuk menjaga integritas dan memperjuangkan semua kepentingan nasional negaranya. Salah satu aspek yang mendukung upaya penegasan kepentingan nasional adalah kekuatan nasional atau yang disebut juga *National Power*.

National Power Theory atau Teori kekuatan nasional telah dikembangkan oleh para peneliti dari berbagai negara. Hans J. Morgenthau merupakan salah satu figur politik dengan pemikiran realisme yang sangat berpengaruh menjelaskan yang disebut dengan "*The elements of National Powers*" memiliki arti bahwa sejumlah elemen perlu dilengkapi oleh suatu negara supaya mempunyai kekuatan nasional. Dalam konseptual, penggunaan teori kekuatan nasional dapat berlainan antar suatu negara dengan negara lain, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosial budaya, dan aspek lainnya yang menyebabkan perspektif masing-masing negara juga berbeda. Kekuatan nasional mengukur kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuannya dan melindungi kepentingan nasionalnya.⁹

⁸ "Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 13."

⁹"Hans J Morgenthau, *Politics among nations* (New York: McGraw-Hill, 1993), hal. 81."

Kekuatan nasional juga berarti bahwa kekuatan negara di kancah internasional menjadi milik negara itu sendiri dan frustrasi dalam komunitas nasional dikompensasi oleh kepuasan negara terhadap kekuatan nasional. Kekuasaan yang dikejar oleh individu untuk kepentingannya sendiri dianggap sebagai kejahatan yang dapat ditolerir hanya dalam batas-batas tertentu dan dalam aspek-aspek tertentu, sementara kekuasaan dijalankan dengan menyamar sebagai ideologi atas nama dan demi bangsa, karenanya hal ini merupakan kebaikan yang harus dicita-citakan oleh semua warga negara. Simbol nasional, terutama yang melambangkan sejauh mana suatu negara berhubungan dengan angkatan bersenjata dan hubungannya dengan negara lain, merupakan sarana untuk mengidentifikasi individu dengan kekuatan nasional.¹⁰

Kekuasaan nasional memiliki tiga unsur penting, yaitu *power*, geografi, dan strategi. Melalui tiga elemen kuat ini, negara mencari cara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Skema tersebut berhubungan kuat pada garis perekonomian negara, dan dua-duanya dipergunakan untuk membentuk federasi dan mengamankan relevansi nasional. Penerapan kiat militer merupakan prosedur akhir ketika usaha diplomasi dan ekonomi tidak berhasil mempertahankan kepentingan nasional.¹¹

Teori kekuatan nasional disini digunakan untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh dua Korea. Kualitas diplomasi diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan status kekuatan nasional suatu negara. Oleh

¹⁰ *Ibid.*, 75.

¹¹ Major Robert I dan Boland, *Geography, National Power, and Strategy*, <https://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/BRI.htm> (diakses 1 Januari 2023).

karena itu, kekuatan nasional disini juga akan menemukan titik berat urgensi *power* yang dimiliki Indonesia dalam upaya memulihkan situasi damai di Semenanjung Korea.

Korea Utara lebih unggul dalam hal kesiapan militer, geografi, sumber daya alam, kualitas diplomasi, dan moral bangsa apabila dibandingkan dengan Korea Selatan. Kualitas diplomasi adalah kekuatan sesungguhnya suatu negara. Korea Utara sedikit lebih baik daripada Korea Selatan karena walaupun keadaan Korea Utara secara ekonomi dan sosial tidak memungkinkan, tetapi tetap bertahan hingga masa ini. Ekspansi senjata nuklir Korea Utara adalah gambaran kekuatan nasional yang diaplikasikan sebagai teknik berdiplomasi dan digunakan sebagai permainan negosiasi bersama negara lain.¹² Sedari itu, kesejahteraan di Korea Selatan terancam dan menimbulkan ketegangan. Selain itu, Korea Utara tidak terikat oleh perjanjian apa pun yang akan memaksanya menyerahkan kekuatan nasionalnya.

Konsep kepentingan nasional menjadi titik mendefinisikan sikap kebijakan luar negeri suatu bangsa. Realis memadankan urgensi nasional dengan perjuangan bangsa demi otoritas. Suatu negara dapat meningkatkan serta mempertahankan aturan pada bangsa lain yang memegang kekuasaan, dimana aliansi otoritas atau kontrol dilaksanakan melalui paksaan atau kerjasama untuk memungkinkan negara tersebut bersaing dengan kekuatannya dalam dunia politik internasional. Mendapatkan tenaga nuklir ke tangan Korea Utara secara otomatis meningkatkan nilai negosiasi Korea Utara di mata masyarakat internasional.

¹² Dhita Novebrin Nidia, "Sunshine Policy Pada Masa Pemerintahan President Lee Myung Bak," *Jurnal HI*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12157/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=11&isAllowed=y>

Diplomasi sebagai bagian dari kekuatan nasional yang dalam arti luas menunjukkan bahwa negara-negara yang hidup dalam lingkungan internasional membutuhkan hubungan diplomatik yang baik untuk mencari peluang yang lebih besar dan mengantisipasi ancaman di masa depan. Hal ini tercermin dari urgensi Indonesia untuk menjalin hubungan bilateral yang baik dengan kedua Korea. Indonesia berperan aktif dalam beberapa isu kawasan, Korea Selatan bahkan menganggap Indonesia berperan penting dalam konflik di Semenanjung Korea karena Indonesia merupakan pemain penting di ASEAN.

Berdasarkan hal di atas, hal tersebut dapat disimpulkan dengan melihat negara dari sudut pandang negara lain. Diplomasi antar negara terpengaruh dari reaksi satu negara berkenaan dengan negara lain, termasuk persepsi terhadap sistem penangkalan (*deterrence*) dari negara. Kekuatan suatu negara (dari sudut pandang negara lain) merupakan kumpulan faktor sinergis antara potensi penduduk dan letak geografis, kemampuan ekonomi, kemampuan militer, strategi nasional, serta kemauan nasional atau tekad rakyat untuk melaksanakan strategi nasional. Suatu negara akan memiliki *power* yang besar ketika memiliki potensi geografis yang besar atau negara dengan wilayah fisik dan sumber daya manusia yang luas.

2.2.3 Teori Perdamaian Demokratis (*Democratic Peace Theory*)

Teori perdamaian demokratis cukup dikenal dalam ilmu HI, khususnya mengenai pendekatan liberal. Pengertian tentang keadilan, ketertiban, kebebasan dan standar dalam gagasan liberalisme menimbulkan catatan yang berbeda dengan pandangan realistik tentang interaksi antar aktor, atau pada masalah ini bangsa, yang tetap identik pada struktur konflik, bentrokan senjata, serta kegaduhan. Perdamaian demokratis adalah teori pendekatan liberal

terhadap masalah keamanan internasional, khususnya beberapa fenomena pasca-Perang Dingin. Bagi penganjur teori perdamaian demokratik, demokrasi menciptakan perdamaian antar negara demokrasi, perang dan kekerasan antar negara demokrasi dapat diminimalkan atau bahkan tidak terjadi sama sekali.¹³

Konsep teori perdamaian demokratis dapat ditemukan pada karya awal Immanuel Kant dengan berpendapat bahwasannya negara demokratis tidak akan melakukan perang melawan negara demokrasi lainnya. Pemikiran tersebut merupakan hasil pengamatannya pada abad ke-18. Kant menjelaskan bahwa perdamaian internasional dapat diciptakan melalui tiga landasan dasar, antara lain yakni konstitusi republik (demokrasi), perdagangan bebas dan saling ketergantungan, serta konstitusi global dalam gambaran organisasi internasional.¹⁴

Masyarakat dunia percaya bahwa sistem demokrasi adalah cara yang tepat untuk mengakhiri perang, karena dengan sistem seperti itulah keagresifan negara dapat ditekan dengan kehendak publik. Liberalisme sangat percaya bahwa kekuatan masyarakat dapat mengekang ambisi suatu negara untuk menggunakan kekerasan terhadap negara lain. Di mata kaum liberal, negara tunduk pada aspirasi rakyat, dan jika negara memutuskan untuk berperang, ia harus melalui mekanisme *check and balance* di parlemen. Dengan adanya logika seperti ini, demokratisasi adalah kabar baik bagi perdamaian dunia.

¹³ Ibid., 28

¹⁴ Mohammad Ridwan, "Proses Dan Prospek Demokratisasi Negara Myanmar : Suatu Tinjauan Perspektif Demokrasi Perdamaian Liberal", Academia.edu, https://www.academia.edu/25857889/PROSES_DAN_PROSPEK_DEMOKRATISASI_NEGARA_MYANMAR_SUATU_TINJAUAN_PERSPEKTIF_DEMOKRASI_PERDAMAIAN_LIBERAL

Demokrasi bersaing untuk kepentingan nasional mereka. Namun persaingan diikuti oleh kekerasan dan solusi kemiliteran, sebagai contoh yang terjadi di bangsa non-demokratis. Karena negara demokrasi terbalut pada nilai dan lembaga internasional. Dalam persaingan ini, negara-negara demokrasi berusaha mengedepankan kepentingan atau perbedaan pendapatnya melalui cara-cara non-militer, seperti mediasi, negosiasi, dan diplomasi.¹⁵

Secara umum, Korea Utara menganut sistem politik otoriter/totaliter (kediktatoran) yang disebut juga dengan sistem satu partai. Partai diatur berdasarkan prinsip sistem demokrasi terpusat, di mana sidang partai sebagai lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam urusan nasional. Dalam hal ini, sistem demokrasi yang dibangun Korea Utara adalah partai berkuasa dengan menjadikan ideologi menjadi pusat dengan posisi tertinggi dalam struktur kekuasaan nasional yang secara efektif mengendalikan kekuasaan legislatif, administratif, dan yudikatif dengan model menyeluruh. Partai tidak saja menguasai ketiga bagan tersebut, tetapi juga mengatur lembaga kemasyarakatan dan kegiatan masyarakat. Sebab itulah Korea Utara disebut sebagai “negara partai”.¹⁶

Korea Utara adalah bangsa komunis dengan tingkat perekonomian yang lemah, tetapi mempunyai senjata jarak jauh. Berbeda dengan Korea Selatan yang memangku kerakyatan dan merupakan vitalitas perekonomian yang cukup berpengaruh di dunia global, sedangkan Korea Selatan didorong secara militer oleh

¹⁵ John Baylis, *International and Global Security in The Post Cold War Era* (New York: Oxford University Press, 2005), hal. 257.

¹⁶ KBS World, *Ringkasan ciri khas rezim Korea Utara*, <https://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/politics/summary.htm?lang=i> (diakses pada 1 Januari 2023).

Amerika Serikat. Perbedaan politik serta ketidaktertarikan merupakan hambatan untuk mencapai perdamaian di semenanjung Korea melalui jalan datar atau akses negara.¹⁷

Bentuk pemerintahan di Korea Utara berbeda dengan skema demokrasi karena demokrasi memfokuskan pada kontrol yang tidak terkonsentrasi. Otoritarianisme diartikan sebagai suatu skema politik otoriter yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang lebih menekankan kekuasaan suatu negara atau individu tertentu. Kekuasaan terpusat ini tidak melihat kebebasan individu lain. Oleh karena itu, sistem otoriter dianggap kebalikan dari demokrasi. Hal ini karena sistem demokrasi melalui pemilihan umum untuk mendapatkan kekuasaan.

Meski Korea Utara mempertahankan rezim yang sangat otoriter, Korea Utara tetap menggelar pemilihan umum dengan tujuan menetapkan anggota parlemen. Pada 3 Maret 2019, rakyat Korea Utara mengadakan pemilihan umum dengan tujuan menetapkan anggota parlemen. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut merupakan pemilihan umum kedua sejak Kim Jong-un menjabat di negara itu.¹⁸ Hal ini menimbulkan persepsi bahwa Kim Jong-un memanipulasi aktivitas partai politik demi mempertahankan representasi seakan-akan Korea Utara tumbuh sebagai negara demokratis. Meskipun begitu, pemilihan parlemen itu sendiri diadakan di Korea Utara setiap lima tahun. Antusiasme masyarakat Korea Utara

¹⁷ Devy Indah Paramitha, Thesis: *Keterlibatan Masyarakat Sipil (Gppac) Dalam Inisiasi Proses Perdamaian Di Semenanjung Korea*, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2018), hal. 81.

¹⁸ Amelia Fitriani, "Selangkah Lebih Dekat Mengenal Demokrasi Di Korea Utara", RMOL.ID, 11 Maret 2019, <https://dunia.rmolid/read/2019/03/11/381640/selangkah-lebih-dekat-mengenal-demokrasi-di-korea-utara> (diakses pada 1 Januari 2023).

terhadap pemilihan umum ini juga relatif tinggi dan bahkan menyebutnya sebagai pesta demokrasi.

Dengan menggunakan Teori Perdamaian Demokratis diharapkan dapat menjadi titik awal dalam upaya memulihkan situasi damai serta stabilitas di Semenanjung Korea yang terus bersitegang selama ini karena kedua Korea. Walaupun berbeda pandangan politik, kedua Korea merupakan negara yang menganut politik demokratis dan telah mengimplementasikan norma-norma demokrasi ke dalam skema pemerintahannya. Prinsip utama dari teori ini adalah dinyatakan bahwa negara-negara demokrasi ragu-ragu atau tidak terlibat dalam konflik bersenjata dengan negara-negara demokrasi lainnya. Di antara para pendukung teori perdamaian demokratis, beberapa faktor dipertimbangkan untuk mempromosikan perdamaian di antara negara-negara demokratis.

Pada umumnya, negara demokrasi memiliki nilai-nilai harmonis yang meyakini bahwa perang adalah sesuatu yang merugikan negara dan warganya. Keputusan para pemimpin negara demokrasi didasarkan pada norma umum warga negara, saling percaya, bahwa keputusan yang dibuat adalah keputusan terbaik, dan mengutamakan cara yang lebih menguntungkan dan lebih murah untuk menyelesaikan masalah kedua negara. Sementara itu, negara-negara demokrasi secara kelembagaan dibatasi oleh konstitusi, pemimpin negara-negara demokrasi tidak dapat mengambil keputusan tanpa memeriksa konstitusi, negara-negara

demokrasi harus mengutamakan pendapat rakyat yang memilihnya, dan rakyat cenderung memilih negosiasi daripada perang untuk selesaikan konflik.¹⁹

Kant percaya bahwa dalam demokrasi orang cenderung memilih perdamaian dan pemerintahan demokratis lebih sensitif ketika keputusan yang memakan banyak biaya, dikombinasikan dengan konsekuensi perang yang mempengaruhi mereka dan orang yang mereka cintai, menyebabkan cedera atau bahkan menyebabkan kematian. Sebaliknya, negara non-demokrasi cenderung menyukai perang karena metode pengambilan keputusan mereka tidak dibatasi oleh sistem *checks and balances* atau pemilu. Operasional dari *Democratic Peace Theory* mengkaji bagaimana norma demokrasi dan institusi demokrasi dapat mempengaruhi aliansi antar kedua Korea sehingga keduanya mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Teori perdamaian demokratis dan para pendukungnya mengklaim bahwa sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara menciptakan perdamaian abadi. Namun atas dasar itu, negara-negara demokratis tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk bergabung dengan negara-negara non-demokratis melalui paksaan. Penilaian terhadap tingkat subjektivitas yang sangat tinggi dapat dilihat dengan asumsi bahwa demokrasi adalah sistem perdamaian.

Demokrasi hanyalah sebagian dari banyaknya sistem yang dapat mewujudkan perdamaian. Oleh sebab itu, demokrasi tidak dapat dijadikan tanggungan untuk perdamaian, karena masih banyak alasan perang selain alasan

¹⁹ Ahmad Daniel Kusumah Anshary, "Perang Ekuador Dan Peru Tahun 1995: Analisis Democratic Peace Theory", *ASCARYA*, Vol. 1 No.2 (2021), hal. 116.

ideologis. Teori perdamaian demokratis berfokus bahwa nilai-nilai dan institusi demokrasi berpengaruh terhadap terciptanya perdamaian antar negara demokrasi. Indonesia, salah satu negara dengan kebijakan demokrasi yang kuat, juga ikut serta dalam penyelesaian konflik di semenanjung Korea.²⁰

Merujuk pada teori perdamaian demokrasi, peran Indonesia menjadi kekuatan pendorong yang dominan di balik agenda perdamaian di Semenanjung Korea. Dengan mewujudkan proses perdamaian melalui jalur demokratis-politik, Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai jalur yang menyatukan bermacam usaha demi mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

2.3 Kerangka Pemikiran

Konsep manajemen konflik digunakan dalam penelitian ini melihat dari antusias Indonesia untuk bertanggung jawab sebagai pihak ketiga atau mediator konflik di Semenanjung Korea saat ini. Selain untuk alasan kemanusiaan, keikutsertaan untuk berperan aktif ini juga sebagai alasan supaya Indonesia dapat melambungkan *power* yang dimiliki sehingga dapat menarik negara lain.

Manajemen konflik termasuk sebagai prosedur yang digunakan pihak ketiga dengan tujuan untuk meluruskan konflik ke segi hasil khusus yang memungkinkan atau tidak memiliki hasil akhir berbentuk rekonsiliasi konflik, dan membuahkan situasi tenang, hal nyata, inovatif, harmonis atau ofensif. Persepsi dalam

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Tingkatkan Kepercayaan dan Optimisme Masyarakat, Perlu Demokrasi yang Berkualitas*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30451/tingkatkan-kepercayaan-dan-optimisme-masyarakat-perlu-demokrasi-yang-berkualitas/0/berita> (diakses 1 Januari 2023)

manajemen konflik mengarah kepada metode yang berfokus pada gambaran interaksi dari para aktor konflik dan mediator, dan dengan cara apa mereka menularkan pemahaman dan kepentingan.

Agresi-agresi sudah sering dilaksanakan untuk mengatasi konflik di Semenanjung Korea, maka dari itu dapat dijelaskan bahwa ketegangan yang terjadi di Semenanjung tersebut sudah menduduki masa darurat yang membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Teori perdamaian diplomatik berbicara mengenai usaha-usaha diplomatik yang dijalankan oleh pihak ketiga dengan maksud memadamkan kemarahan dari pelaku yang berkonflik agar bentrokan senjata dapat dijauhkan.

Indonesia mempunyai fondasi yang memadai untuk mempertahankan keamanan nasionalnya dari konflik di Semenanjung Korea. Apabila terjadi peperangan di kawasan Semenanjung Korea maka akan berpengaruh langsung kepada sukseki perekonomian Indonesia khususnya yang mempergunakan lintas laut. Maka keamanan nasional adalah satu keadaan dimana negara bersedia melangsungkan apapun demi menghindari kemungkinan ancaman yang terjadi, maka dari itu diplomasi mengambil perannya dalam hal ini.

Berusaha untuk mempertahankan kepentingan nasional dan meningkatkan kekuatan nasional masing-masing negara, menyebabkan konflik antar Korea Utara dan Korea Selatan makin menjadi-jadi. Hal ini semakin diperparah karena kedua Negara berupaya unjuk diri dengan terus mengembangkan kekuatan militernya demi menjaga kekuatan nasional. Dengan menelaah dari sudut pandang teori *National Power*, maka kedua Negara berjuang untuk mewujudkan kepentingan

nasional mereka, terutama yang berkaitan dengan mempertahankan pengaruh dan keamanan kawasan regional.

